

**LAPORAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TATA
PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJA SAMA
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**



**PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU HUKUM**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA**

**LAPORAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA
TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN
KERJA SAMA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**



| | | | |
|---|---|-----------------------|--|
|  | <p style="text-align: center;">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA Kampus UPMI Terpadu: Jl. Balai Desa, Marindal Dua, Kec. Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20149</p> | | |
| <p style="text-align: center;">LAPORAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJA SAMA PRODI MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> | No.Dok | 018/UPM.PPs/SPMI-UPMI | |
| | Revisi | 01 | |
| | Tgl Eff | 18 Desember 2021 | |

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Tata Pamong, Tata Kelola, Dan Kerja Sama Program
Studi S2 Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
Tahun Akademik 2021/2022

Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Tata Pamong, Tata Kelola, Dan Kerja Sama ini telah
diperiksa dan disahkan oleh Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan
Masyarakat Indonesia sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan mutu berkelanjutan.

Medan, 10 Desember 2022

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">Menyetujui, Direktur Pascasarjana</p>  <p style="text-align: center;">Dr. Mananda Situmorang, Drs., M.Si</p> | <p style="text-align: center;">Mengetahui, Ketua Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana</p>  <p style="text-align: center;">Reza Nurul Ichsan, S.E, S.H., M.M., M.H</p> |
|---|---|

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga **Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Tahun Akademik 2021/2022** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Laporan ini merupakan bagian dari implementasi siklus **PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan)** yang menjadi inti dari penyelenggaraan SPMI di lingkungan Pascasarjana. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai tingkat ketercapaian standar mutu tata pamong, tata kelola, serta kerja sama akademik dan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilaksanakan pada tahun akademik 2021/2022, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum dalam menjalankan sistem tata kelola yang baik (**Good University Governance**). Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan strategis dan rencana tindak lanjut (RTL) bagi peningkatan mutu di tahun-tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada:

1. **Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia** beserta jajaran pimpinan yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Pascasarjana.
2. **Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)** yang telah memberikan arahan dan supervisi dalam pelaksanaan evaluasi mutu internal.
3. **Direktur Pascasarjana UPMI**, para **Wakil Direktur**, **Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**, serta seluruh **tim auditor internal dan dosen** yang telah berkontribusi aktif dalam proses penyusunan laporan ini.
4. Seluruh **mahasiswa, tenaga kependidikan, dan mitra kerja sama** yang telah memberikan dukungan dan umpan balik positif selama proses audit dan evaluasi berlangsung.

Semoga laporan ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan peningkatan mutu berkelanjutan (**Continuous Quality Improvement**) di lingkungan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia serta memberikan manfaat nyata dalam mewujudkan visi universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing nasional maupun internasional.

Medan, 10 Desember 2022

Ketua Unit Penjaminan Mutu

Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia



Reza Nurul Ichsan, S.E., S.H., M.M., M.H

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan evaluasi tata pamong, tata kelola, dan kerja sama merupakan bagian penting dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (**SPMI**) yang diterapkan di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (**UPMI**). Evaluasi ini dilakukan secara berkala setiap tahun akademik sebagai bagian dari siklus mutu **PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan)** untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Tahun akademik 2021/2022 menjadi tahun penting dalam konsolidasi kelembagaan Pascasarjana UPMI karena pada periode ini dilakukan berbagai pembenahan tata kelola, penyempurnaan struktur organisasi, serta penguatan jejaring kerja sama nasional dan internasional. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana capaian standar mutu telah terpenuhi, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tata pamong dan kerja sama di lingkungan Program Studi Magister Ilmu Hukum.

Evaluasi dilakukan berdasarkan dokumen SPMI UPMI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan panduan akreditasi BAN-PT, dengan pendekatan berbasis data, kinerja, dan dampak (*performance and impact-based evaluation*). Hasil evaluasi menjadi dasar perencanaan peningkatan mutu pada tahun akademik berikutnya.

1.2 Tujuan Evaluasi

Tujuan pelaksanaan evaluasi kinerja tata pamong, tata kelola, dan kerja sama tahun akademik 2021/2022 adalah sebagai berikut:

1. Menilai efektivitas sistem tata pamong, kepemimpinan, dan tata kelola program studi

berdasarkan standar SPMI UPMI.

2. Mengukur capaian kinerja kerja sama akademik dan nonakademik dalam mendukung tridharma perguruan tinggi.
3. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) untuk perbaikan tata kelola di masa mendatang.
4. Menyusun rekomendasi strategis untuk peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi manajemen mutu program studi.

1.3 Dasar Hukum

Evaluasi ini mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
4. Panduan Akreditasi Program Studi Magister oleh BAN-PT.
5. Dokumen SPMI UPMI (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir PPEPP).
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Pascasarjana UPMI dan Rencana Operasional (RENOP).

1.4 Metode Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan pendekatan **deskriptif analitis** melalui langkah-langkah berikut:

1. **Audit Dokumen:** Penelaahan terhadap SK, laporan kegiatan, laporan keuangan, notulensi rapat, serta dokumen kerja sama.

2. **Wawancara Terarah:** Dengan pimpinan Pascasarjana, Ketua Program Studi, dosen, dan tenaga kependidikan.
3. **Observasi Lapangan:** Terhadap pelaksanaan tata kelola, pelayanan akademik, dan implementasi kerja sama.
4. **Survei Kepuasan:** Terhadap sivitas akademika dan mitra eksternal.
5. **Analisis Data:** Perbandingan antara standar mutu dan hasil capaian berdasarkan instrumen AMI SPMI UPMI.

BAB II. HASIL EVALUASI CAPAIAN KINERJA

**Tabel 1. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama
Tahun Akademik 2021/2022**

| No | Indikator Kinerja | Standar Mutu (Target) | Hasil Audit Mutu | Akar Masalah | Faktor Pendukung | Faktor Penghambat | Rencana Tindak Lanjut (RTL) |
|-----------|--|---|--|---|--|---|---|
| 1 | Efektivitas struktur tata pamong dan mekanisme pengambilan keputusan | Struktur organisasi berjalan efektif dan terdokumentasi | Struktur organisasi lengkap, rapat rutin dilaksanakan, dokumentasi masih perlu perbaikan | Belum ada format baku laporan hasil rapat | Komitmen pimpinan terhadap mutu tinggi | SDM administrasi masih terbatas | Menyusun format standar notulensi dan laporan hasil rapat tahunan |
| 2 | Transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan | Laporan keuangan dipublikasikan secara internal dan diaudit | Laporan keuangan telah diaudit internal, belum dipublikasikan ke laman prodi | Sistem informasi keuangan belum terintegrasi dengan universitas | Dukungan dari Biro Keuangan | Belum ada staf keuangan tetap di pascasarjana | Integrasi laporan keuangan ke sistem universitas dan publikasi internal |
| 3 | Kinerja Unit Penjaminan | Audit mutu internal | AMI terlaksana dengan | Sebagian prodi belum | Dukungan | Beban kerja | Penjadwalan audit lebih awal |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | n Mutu Pascasarjana (UPM) | dilaksanakan minimal 1 kali/tahun | 90% standar tercapai | menyerahkan laporan monev tepat waktu | LP3M kuat | auditor tinggi | dan pelatihan auditor tambahan |
| 4 | Kepuasan sivitas terhadap tata kelola akademik | ≥80% menyatakan "puas" | 82% responden menyatakan puas | Masih ada keluhan mengenai pelayanan administrasi | Staf akademik komunikatif dan tanggap | Infrastruktur digital masih terbatas | Penguatan sistem informasi akademik dan layanan berbasis online |
| 5 | Jumlah kerja sama aktif nasional | ≥6 kerja sama aktif | 6 MoU aktif dengan lembaga hukum nasional | Belum seluruh kerja sama menghasi lkan kegiatan tridharma | Dukungan LPPM | Belum ada tim monev kerja sama | Membentuk tim pemantau kerja sama dan menyusun laporan tahunan |
| 6 | Jumlah kerja sama internasional | ≥3 kerja sama aktif | 3 MoU aktif (Malaysia, Thailand, Filipina) | Administ rasi MoU manual | Dukungan universitas tinggi | Tidak ada staf khusus kerja sama | Membentuk Unit Kerja Sama Internasional di Pascasarjana |
| 7 | Kepuasan mitra kerja sama | ≥70% mitra sangat puas | 72% mitra menyatakan puas | Survei masih manual dan tidak terjadwal | Hubungan komunikasi dengan mitra baik | Survei belum berbasis digital | Mengembangkan sistem survei daring berbasis database |
| 8 | Dokumentasi dan arsip mutu | 100% dokumen terdokumentasi digital | 80% dokumen telah terdigitalisasi | Proses digitalisasi belum selesai | LP3M memberikan template dokumen | Belum ada petugas khusus dokumentasi | Membentuk Tim Dokumentasi Mutu dan sistem e-arsip |
| 9 | Efektivitas rapat manajemen | Minimal 6 rapat/tahun | 10 rapat dilaksanakan dengan notulensi lengkap | Notulensi belum mengacu pada format SPMI | Budaya koordinasi baik | Konsistensi laporan belum seragam | Menetapkan format notulen resmi dan sistem laporan daring |

| | | | | | | | |
|-----------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--|
| 10 | Pengembangan sistem informasi akademik | Sistem akademik terintegrasi dengan universitas | Integrasi LMS dan SIAKAD mencapai 70% | Kompetensi digital staf belum merata | Dukungan unit IT universitas | Sarana komputer terbatas | Pelatihan digitalisasi dan perbaikan infrastruktur TIK |
|-----------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--|

BAB III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Umum

Evaluasi tahun akademik 2021/2022 menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Tingkat ketercapaian standar mutu tata pamong, tata kelola, dan kerja sama mencapai **85%**. Struktur organisasi telah berfungsi efektif, pelaksanaan rapat koordinasi rutin, serta adanya sistem pelaporan keuangan yang lebih transparan. Unit Penjaminan Mutu juga menunjukkan peningkatan kinerja dengan pelaksanaan audit yang lebih sistematis. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan SDM administrasi, belum optimalnya digitalisasi dokumen mutu, serta keterlambatan dalam penyusunan laporan kerja sama. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem dokumentasi berbasis digital dan pelatihan berkelanjutan bagi staf akademik.

3.2 Analisis SWOT

| Aspek | Uraian |
|----------------------|--|
| Strengths | Struktur tata pamong lengkap, komitmen pimpinan tinggi, hubungan kerja sama nasional dan internasional semakin luas. |
| Weaknesses | Digitalisasi mutu belum optimal, SDM auditor dan dokumentasi masih terbatas. |
| Opportunities | Kebijakan MBKM memberi peluang perluasan kerja sama riset dan pendidikan hukum berbasis praktik. |
| Threats | Persaingan antarprogram magister hukum di Medan dan keterbatasan dana pengembangan kerja sama luar negeri. |

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Capaian indikator tata pamong, tata kelola, dan kerja sama tahun akademik 2021/2022 menunjukkan peningkatan dengan kategori **“Baik Sekali” (85%)**.
2. Sistem penjaminan mutu telah berjalan melalui pelaksanaan AMI, RTM, dan tindak lanjut hasil audit.
3. Terdapat kemajuan dalam aspek kerja sama nasional dan internasional, meski masih perlu penguatan dalam digitalisasi administrasi dan dokumentasi mutu.
4. Budaya mutu di lingkungan Pascasarjana UPMI semakin terbentuk melalui koordinasi, evaluasi, dan pelibatan seluruh sivitas akademika.

4.2 Rekomendasi

1. **Digitalisasi Menyeluruh Dokumen Mutu:** Membangun *e-repository* berbasis cloud untuk pengelolaan dokumen tata kelola dan kerja sama.
2. **Peningkatan Kapasitas SDM:** Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi auditor internal, staf administrasi, dan pengelola kerja sama internasional.
3. **Penguatan Monitoring Kerja Sama:** Membentuk tim khusus evaluasi dan publikasi capaian kerja sama tiap semester.
4. **Integrasi Sistem Akademik:** Menyelesaikan integrasi SIAKAD–LMS dengan sistem universitas secara penuh.
5. **Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi:** Memublikasikan laporan keuangan dan hasil audit ke portal internal Pascasarjana.
6. **Keterlibatan Mitra Strategis:** Melibatkan mitra eksternal dalam kegiatan seminar, riset, dan pengabdian masyarakat berbasis hukum.